

Law and Regulation

- Act No. 31/ 1999 and its revision Act 20/ 2001 on Corruption Eradication Act (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- Act No. 17/2003 on State Finance (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- Act No. 1/2004 on State Treasury (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- Act No. 15/2006 on Audit Board Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654)
- Act No. 32/2009 on Environmental Protection and Management (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- Act No. 28/ 1999 on Clean and Free Governance from Corruption, Collusion and Nepotism (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
- Minister of Environment Regulation Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Decree of Chief of Supreme Court

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Court Decision

- Constitutional Court Decision Number 001-021-022/PUU-I/2003
- Constitutional Court Decision Number 003/PUU-IV/2006
- Constitutional Court Decision Number No. 25/PUU-XIV/2016
- Court Decision No. 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst

International Agreement

United Nations Convention Against Corruption, 2004, New York.

Book

Ariman, M. Rasyid, 1988, *Fungsi hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2008, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, Penegakan Hukum Lingkungan, *Environmental Law Enforcement*, 2016, PT Alumni Bandung.

Hardjosoemantri, 2005, Koesnadi *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.

Kanner, Allan, “ *The Public Trust Doctrine, Parens Patriae, and The Attorney General as The Guardian of The State’s Natural Resources*”, Duke Environmental Law & Policy Forum, Vol.16 (2005)

Makawimbang, Hernol Ferry 2014, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Penerbit Thafa Media.

Marlyna, Henny *et. al*, 2011, “*Pengembalian Aset Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata*” (paper presented on Konferensi Nasional Hukum dan Politik in Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Marzuki, Peter Mahmud 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty)

Moeljatno, 2009, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta.

Punadi *et al*, 1988, *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ranuhandoko, I.P.M, 2003 *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga

Rangkuti, Siti Sundari, 2003, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Cetakan III.

Sands, Philippe, 1995, *Principles of International Environmental Law: Vol. 1, Frameworks, Standards, and Implementation*, Manchester University Press, Manchester.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soroinda, Disriani Latifah *et. al*, 27 October 2011 “*Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Korupsi Melalui Gugatan Perdata*,” Research result presented on *Konferensi Nasional Hukum dan Politik 2011 Fakultas Hukum Universitas Indonesia*

Sumardjono, Maria S.W., 1995. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian- Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Saparadja Komariah Emong, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia* (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi), Penerbit Alumni Bandung

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Turner, Chris and Kemp, Jo Boylan, 2012, *Unlocking Legal Learning*, Routledge, 3rd Edition USA.

Wijayanto dan Zachrie Ridwan (editor), 2010, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Umum Jakarta.

Wibisana, Andri G 2017, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, BP-FHUI, Jakarta.

Wiyono R., 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama.

Journal

Astuti, Chandra Ayu dan Chariri Anis, 2015, *Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK dalam Tindak Korupsi*, dalam *Diponegoro Journal of Accounting*, Semarang.

Isra, Saldi dan Hiariej, Edward O.S. 2009, *Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia*.

Marbun. Andreas Nathaniel 2017. *Suap di Sektor Privat; Dapatkah Dijerat*. Mappi – Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Jurnal Integritas* Volume 3 – No 1 – Tahun 2017. <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/suap-di-sektor-privat-dapatkah-dijerat>.

Wibowo, Richo Andi, 2016, *Kejagalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan Kaitannya dengan Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 1, Maret 2016, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Article and Workshop

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1982, *Seminar Perkembangan Delik- Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, Bandung, Binacipta.

Hamzah, Chandra dalam acara “Workshop Penyusunan Modul Investigasi dan Penanganan Kasus Korupsi pada Sektor Tata Guna Lahan dan Hutan yang diadakan ICW” pada tanggal 14 September 2012.

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., 30 Januari 2012, Yogyakarta.

Pradipto, Rimawan 2019, *Biaya Sosial Korupsi; Ketika Kita adalah Korban Korupsi*, Diskusi Publik, Komisi Pemberantasan Korupsi. Gedung ACLC, KPK, Jakarta.

Rajagukguk, Erman, 26 Juli 2006, *Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara*, Disampaikan pada Diskusi Publik “Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi” Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta.

Wasis, Basuki *Scientific Evidence*, 2011, *Dalam Perkara Kerusakan Lingkungan Hidup (Perusakan Akibat Pertambangan dan Illegal Logging)*, (Kementerian Lingkungan Hidup dan Mahkamah Agung RI).

Yuntho, dkk, 2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, dalam *Policy Paper Indonesia Corruption Watch*, Jakarta.

Supriyanto, 2018, *Reformulasi Pengertian Unsur yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, Universitas Sebelas Maret.

Dictionary

Fockemma, S.J Andreae, 1983, *Kamus Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

Poerwadarminta, W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Newspaper

Hiariej, Eddy O.S. 07 Mei 2015, *Pasal Keranjang Sampah*, Opini Kompas.

Internet access media

<https://news.detik.com/berita/524637/kasus-korupsi-dl-sitorus-disidangkan-di-pn-jakpus>, accessed on 28 October 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16202/ma-nyatakan-pengusaha-dlsitorus-bersalah/>, accessed on 28 October 2019

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15240/tidak-terbukti-korupsi-dl-sitorus-divonis-8-tahun/>, accessed on 28 October 2019

<https://news.detik.com/berita/d-4384288/kpk-eksekusi-eks-gubernur-sultra-nur-alam-ke-sukamiskin>, accessed on 28 October 2019

<https://beritagar.id/artikel/berita/ma-kurangi-hukuman-nur-alam-menjadi-12-tahun>, accessed on 28 October 2019

<https://beritagar.id/artikel/berita/dua-hal-baru-dalam-tuntutan-kasus-korupsi-nur-alam>, accessed on 28 October 2019

https://www.law.cornell.edu/wex/public_trust_doctrine, accessed on 12 November 2019.

<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/08/02/belum-ada-koruptor-diputus-terbukti-rugikan-perekonomian-negara-406600>, accessed on 24 Oktober 2019

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/6817/Beda-Kuangan-Negara-dan-Kekayaan-Negara.html, accessed on 28 March 2019.

Bär & Karrer, *Anti-corruption & Bribery in Switzerland*, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5bf47031-da96-4ee6-83a5-18d6f09b68ee>, accessed on 3 January 2020

“Doing Business in ASEAN Markets, Leadership Challenges and Governance Solutions across Asian Borders”, management indicator reflected from survey Doing Business Index (DBI), Indeks Persepsi Korupsi (CPI), and Global Corruption Barometer (GCB), accessed on Transparency International, Engaging the Private Sector in the fight against corruption, 2018, https://www.transparency.org/whatwedo/activity/engaging_the_private_sector_in_the_fight_against_corruption, accessed on 13 December 2019.

The Global Competitiveness Index 2018, <http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf>. accessed on 13 December 2019.

Transparency International *Engaging the Private Sector in the fight against corruption*. 2018, https://www.transparency.org/whatwedo/activity/engaging_the_private_sector_in_the_fight_against_corruption, accessed on 12 December 2019.